

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah sebuah daerah otonomi setingkat propinsi di Indonesia dengan ibukota propinsinya adalah Yogyakarta, sebuah kota dengan berbagai predikat, baik dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata. Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi propinsi ini dalam sektor kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan, wisata belanja. Yogyakarta yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang sangat menarik di Jawa Tengah karena memiliki potensi wisata yang besar dan mempunyai ciri khas tersendiri, diantaranya adalah wisata alam, wisata budaya, wisata belanja, wisata religi dan wisata olah raga, dan wisata kampung wisata. Keseluruhannya memiliki atraksi wisata yang berbeda. Salah satu obyek wisata yang sedang digencarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah wisata Kampung Wisata.

Kampung wisata masih memiliki banyak potensi yang belum tergali maksimal untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta akan terus berupaya untuk memperbaikinya saat ini Yogyakarta memiliki 17 kampung wisata yang telah

diresmikan langsung oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tetapi hanya satu kampung saja yang masuk dalam kategori mandiri, sedangkan lima kampung wisata masih dalam taraf rintisan dan 11 sisanya masih termasuk kampung wisata kategori berkembang.¹

Kampung Sosromenduran adalah salah satu dari 17 kampung wisata yang telah dideklarasikan oleh pemerintah tetapi masih termasuk dalam kategori rintisan. Sosromenduran terletak di kecamatan Gedongtengen Yogyakarta, Secara fisik wilayah Kampung Sosromenduran dikenal sebagai kampung internasional karena sebagian besar di huni oleh wisatawan asing dibandingkan wisatawan domestik. Tempat ini biasa dikunjungi karena aksesnya yang dekat dengan pusat aktivitas keramaian Malioboro disamping itu banyak terdapat banyak tempat akomodasi penginapan seperti Hotel, Homestay, Wisma, Losmen. Hal ini tentu sangat disayangkan melihat Kampung Wisata Sosromenduran memiliki banyak potensi untuk menjadi kampung wisata yang mandiri dan dapat diminati banyak wisatawan, sehingga dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung di daerah tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Kampung Wisata Sosromenduran.

Pemerintah Kota Yogyakarta mengeluarkan aturan dan perlindungan hukum terhadap keberadaan Kampung Wisata di Yogyakarta, aturan baru terkait kampung wisata ini ada dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kampung Wisata. Aturan kampung wisata tersebut memuat syarat teknis dan administrasi pendirian

¹ Gardena P, Menulis Referensi dari Internet, 19 Desember 2018, <http://blog.reservasi.com/aturan-kampung-wisata-yogyakarta/>.(21:30).

kampung wisata serta kategori kampung wisata, dibuatnya aturan tersebut adalah salah satu upaya Pemerintah Kota Yogyakarta berkonsentrasi untuk menjual wisata berbasis kampung wisata di Kota Yogyakarta.

Pariwisata memiliki fungsi penting sebagai proses pembangunan nasional karena pariwisata selain meningkatkan lapangan pekerjaan dan pendapatan juga mampu membangun persatuan dan kesatuan serta mengenal budaya bangsa. Visi kepariwisataan Indonesia adalah menumbuhkan kesejahteraan dan perdamaian oleh karena itu pembangunan pariwisata harus mampu memberi manfaat secara adil bagi semua lapisan masyarakat, setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan berperan dan menikmati hasil pembangunan pariwisata sesuai dengan peran yang dilakukannya.²

Pariwisata pada saat ini merupakan suatu kebutuhan mutlak manusia baik yang melakukan perjalanan wisata maupun masyarakat sekitar tujuan daerah wisata, wisatawan butuh fasilitas dan pelayanan yang memadai sementara masyarakat sekitar lokasi akan mendapat implikasi positif berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan, fenomena ini harus menjadi perhatian bagi masyarakat di daerah tujuan wisata sebagaimana diamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan untuk menjadi sektor andalan dan unggulan yang secara luas akan diterjemahkan sebagai penghasil devisa terbesar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

² Emik Rhayu, *Membangun Pariwisata Berbasis Masyarakat*, Stiepari, Semarang, 2008, Hlm. 1

Menurut Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata, pariwisata adalah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan wisata dan didukung oleh fasilitas, jasa dan layanan dari masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah oleh karena itu semua elemen harus bersama sama berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata.

Pada prinsipnya pembangunan pariwisata dituntut mengaplikasikan tiga paradigma utama, yaitu:

1. *Economically Viable*, harus mampu meningkatkan pendapatan, memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. *Socially Acceptable*, harus mampu mewujudkan keadilan sosial, melestarikan serta memperkuat jati diri, kemandirian bangsa, memperkaya kepribadian, mempertahankan nilai nilai agama, serta berfungsi sebagai media menciptakan ketertiban dunia.
3. *Environmentally Sustainable*, harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan berkesinambungan.³

Oleh karena itu pembangunan dan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*) menjadi kunci yang harus dipegang oleh masyarakat yang berada di daerah destinasi wisata. Sebagai komponen utama dalam *community based tourism* (CBT), masyarakat peran yang sangat

³ *Ibid*, Hlm. 2

penting dalam menunjang pembangunan pariwisata, peran serta mereka dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata, pembangunan pariwisata sulit terwujud ketika masyarakat setempat merasa diabaikan, hanya sebagai objek, serta merasa terancam oleh kegiatan pariwisata di daerah mereka.⁴ Masyarakat atau penduduk lokal dapat menjadi penerima manfaat utama dari kegiatan pariwisata lokal, konsep CBT dapat diterapkan dalam penyelenggaraan wisata petualang, wisata budaya dan wisata ekologi, sehingga model CBT sangat cocok untuk pelestarian sumber daya lokal baik sumber daya alam maupun budaya. Dengan demikian diberlakukannya konsep CBT atau pengembangan pariwisata berbasis masyarakat diharapkan dapat menjadikan Kampung Wisata Sosromenduran menjadi kampung wisata yang mandiri.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Wisata Sosromenduran Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat masyarakat dalam upaya pengembangan Kampung Wisata Sosromenduran?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan Kampung Wisata Sosromenduran Yogyakarta.

⁴ Sugiarti, *Pengembangan Pariwisata*, Seminar Wisata Indonesia - Kamboja, 2004

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat masyarakat dalam upaya pengembangan Kampung Wisata Sosromenduran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum dan hukum administrasi negara pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbang saran pemikiran untuk pengembangan Kampung Wisata di Yogyakarta.